

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan dan Bank di Indonesia memiliki peran vital dalam perekonomian, terutama dalam menyalurkan dan mengumpulkan dana publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin ketatnya persaingan bisnis di sektor perbankan diakibatkan dari berbagai perkembangan yang terjadi di lembaga keuangan seperti digitalisasi dan persaingan suku bunga. Akibatnya sangat penting bahwa operasional manajemen serta sistem kinerja diterapkan dengan benar agar terhindar dari risiko negatif. Evaluasi sistem informasi terkini dapat memberikan gambaran yang luas terkait kinerja suatu Bank dapat dinilai baik atau buruk (Prakoso, dkk. 2023). Perbankan di Indonesia dalam perekonomian modern merupakan industri jasa yang dominan dan menunjang hampir seluruh program pembangunan ekonomi, karena kegiatan perekonomian tersebut dijalankan dengan uang (Setyawan, 2019). Perbankan perlu meningkatkan kinerja dan kepercayaan dari masyarakat dengan memiliki manajemen yang baik, menjaga profitabilitas serta meningkatkan modal. Bank dapat menilai keberhasilan untuk merencanakan strategi kedepannya dengan cara mengevaluasi kinerja.

Kinerja keuangan perbankan yang semakin baik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama investor terhadap Bank tersebut. Fidhayatin (2012) menyatakan kinerja keuangan Bank adalah suatu gambaran sejauh mana

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Tenaya (2017) kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan itu sendiri (Syahputra, dkk. 2022). Kinerja dapat diukur menggunakan indikator profitabilitas yaitu rasio kinerja keuangan *Return On Asset* (ROA). Menurut Kasmir (2014), *Return On Assets* adalah rasio keuangan yang menunjukkan imbal hasil atas penggunaan aktiva perusahaan. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu indikator keuangan yang baik, karena dapat menggambarkan keseluruhan dari laporan keuangan. *Return On Asset* adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam menghasilkan laba dalam memanfaatkan aset yg dimiliki. Semakin tinggi ROA maka semakin baik kemampuan Bank dalam menghasilkan laba dan memanfaatkan asetnya, ini menunjukkan kinerja Bank semakin baik. Pada UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak menetapkan ketentuan tentang kesehatan Bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank (Fitrianingsih & Siti, 2022). Selain itu, dampak perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi global masih terasa hingga sekarang (Dewi, 2023). Pandemi ini menyebabkan perlambatan kinerja keuangan perbankan dengan pertumbuhan kredit hanya mencapai 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya, oleh sebab itu meningkatkan kinerja keuangan perbankan menjadi semakin penting bagi Bank itu sendiri (Valentina & Rasyid, 2022).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sektor perbankan memiliki peran krusial dalam menyelaraskan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Berdasarkan laporan Bank Dunia (2012), krisis ekonomi yang melanda negara-negara ASEAN berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan, yang disebabkan oleh kegagalan dalam penerapan GCG. Kegagalan ini terjadi akibat lemahnya sistem hukum, kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan auditor, serta praktik perbankan yang tidak sehat, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank. Saat ini, GCG menjadi salah satu faktor non-keuangan yang harus diperhatikan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan. GCG mengacu pada sistem tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima prinsip utama GCG, yaitu *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (independensi), dan *fairness* (keadilan). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan perusahaan menjalankan operasionalnya dengan baik serta mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang baik, Bank dapat membangun reputasi yang lebih kuat, meningkatkan transparansi, serta menarik kepercayaan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan, seperti investor dan pemerintah. Penerapan GCG yang efektif diharapkan dapat menciptakan stabilitas dalam industri perbankan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu penerapan *Good Corporate*

*Governance* (GCG) sangat penting untuk nasabah, perbankan itu sendiri, investor dan perekonomian.

Di Indonesia berdasarkan kepemilikannya jenis Bank terbagi menjadi lima kategori, yaitu Bank yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN), Bank milik swasta nasional, Bank campuran dengan pemilik baik nasional maupun asing, Bank asing, dan Bank yang dimiliki oleh pemerintah (Mukhtar, 2016). Bank BUMN adalah Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah dan berperan dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional, seperti KUR dan infrastruktur. Contohnya adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Bank swasta nasional, yang dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri, lebih fleksibel dalam inovasi dan bersaing di industri keuangan, seperti BCA, CIMB Niaga, Danamon, dan Permata (Cakranegara & Rahadi, 2021). Bank asing dan campuran merupakan Bank yang dimiliki oleh investor luar negeri atau hasil kerja sama dengan lokal, yang membawa standar perbankan internasional, seperti HSBC Indonesia, UOB Indonesia, dan Maybank Indonesia. Kehadiran Bank asing meningkatkan kompetisi serta memberikan lebih banyak pilihan layanan bagi nasabah. Bank milik pemerintah daerah adalah Bank yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan utama dari Bank ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi regional dan memberikan layanan perbankan yang lebih terjangkau bagi masyarakat di wilayah tersebut. (Cakranegara & Rahadi, 2021). Penelitian ini dilakukan pada sub sektor Bank jenis Bank Swasta Nasional, sebab ROA pada Bank Swasta Nasional cenderung meningkat dari jenis Bank berdasarkan kepemilikan lainnya.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam sub sektor Bank, khususnya pada emiten Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2023-2024. Data yang disajikan mencakup ROA dari empat jenis Bank yang dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya selama empat tahun terakhir, yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari persentase ROA yang dimiliki oleh tiap Bank. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan masing-masing Bank Swasta Nasional di Indonesia, serta membandingkan perubahan dan kinerja mereka selama periode tersebut. Sebagai contoh, berikut ini disajikan data rata-rata ROA Bank Swasta Nasional untuk periode 2021-2024 yang memberikan gambaran lebih dalam mengenai pergerakan kinerja keuangan mereka.

Tabel 1.1  
Data Rata-Rata ROA Sub Sektor Bank Tahun 2021-2024

No	Jenis Bank	Rata-Rata ROA				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
1	Milik Pemerintah	1.20%	1.77%	1.94%	1.87%	Fluktuatif
2	Pembangunan Daerah	-0.07%	-0.19%	0.90%	0.59%	Fluktuatif
3	Swasta Nasional	1.58%	2.17%	2.36%	2.35%	Cenderung Meningkat
4	Asing dan Campuran	1.17%	1.41%	1.25%	1.04%	Fluktuatif

Sumber: Idx.co.id Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa kinerja keuangan Bank Swasta Nasional dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dan cenderung tetap. Sementara jenis Bank lainnya seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank milik pemerintah (BUMN) hingga Bank asing dan campuran rata-rata ROA nya sangat fluktuatif. Bank Swasta Nasional di tahun 2021 memiliki ROA sebesar 1.58% cenderung lebih tinggi dari jenis Bank lainnya di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 Bank Swasta Nasional memiliki ROA sebesar 2.17% lalu di tahun 2023 rata-rata ROA yang didapatkan sebesar 2.36%. Hingga pada tahun 2024 walau terjadi sedikit penurunan namun rata-rata ROA Bank jenis swasta nasional tetap lebih besar dari jenis Bank lainnya yaitu sebesar 2.35%. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ROA perusahaan di Bank Swasta Nasional yang terdaftar di BEI sebagai proyeksi kinerja keuangannya.

Pandemi *Covid-19* meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di banyak perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. GCG menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan, dengan mempengaruhi pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Faktor seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan peran komite audit berpengaruh besar terhadap penerapan GCG. Kepemilikan manajerial mendorong keputusan yang bertanggung jawab, kepemilikan institusional memperkuat praktik GCG, dan komite audit memastikan akurasi laporan keuangan serta pengawasan kebijakan GCG yang efektif. Ketiga faktor ini bekerja bersama untuk memperkuat penerapan GCG dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Tabel 1.2  
Skor Peringkat *Good Corporate Governance* Oleh ACGA 2010-2023

No	Negara	Skor (%)						
		2010	2012	2014	2016	2018	2020	2023
1	Singapura	67	69	64	67	59	63	63
2	Thailand	55	58	58	58	55	57	54
5	Malaysia	52	55	58	56	58	60	61
4	Filipina	37	37	40	38	37	39	38
<b>5</b>	<b>Indonesia</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>36</b>

Sumber: *CG Watch report on the corporate governance*

*CG Watch* adalah survei yang dilakukan setiap dua tahun oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) dan *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLSA) untuk mengukur kualitas tata kelola perusahaan secara makro di 12 pasar di kawasan Asia-Pasifik. *Asian Corporate Governance Association* sebuah lembaga yg mengompertisikan penerapan kebijakan GCG dan diikuti oleh perusahaan se-Asia Pasifik di tahun 2023 Indonesia menduduki rangking terbawah dari 12 negara Asia dan menduduki peringkat ke-5 dari seluruh negara ASEAN. Menurut hasil riset *CG Watch 2020* yang diselenggarakan oleh ACGA dan CLSA, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang berada di posisi terbawah selama sepuluh tahun terakhir (Gunawan, 2023). Indonesia mendapatkan posisi terakhir dalam penerapan GCG selama 10 tahun dengan skor terakhir 36%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia bisa dikatakan masih sangat lemah. Pada tahun 2018 Indonesia memperoleh skor sebesar 34% kemudian tahun 2020 skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,4% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi tata kelola perusahaan khususnya pada aspek

GCG masih tergolong rendah, sehingga perlu ada perbaikan dalam penerapan mekanismenya. ACGA juga memberi catatan pada Indonesia terkait performa GCG yang masih kurang demi adanya peningkatan kedepannya. OJK masih menjadi penggerak utama regulasi CG di Indonesia, meskipun pasca pandemi kemajuannya terkesan stagnan. Fokus OJK lebih terbagi pada pengawasan sektor lainnya sementara masalah GCG belum diprioritaskan seutuhnya (*Asian Corporate Governance Association, 2024*). Maka dari itu, penerapan *Good Corporate Governance* dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi, sehingga kinerja perusahaan dapat ikut meningkat.

Pada GCG terdapat empat mekanisme yang mempengaruhi hubungan keagenan antara *agent* dan *principal*, digunakan dalam mengenai *Good Corporate Governance* untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial (Wijayanti & Mutmainah, 2012). Pada penelitian Setyawan (2019) mempergunakan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Komite Audit sebagai indikator mekanisme *corporate governance*. Adi dan Suwarti (2022) menyatakan variabel-variabel dalam GCG seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional memiliki hubungan dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Holly dan Lukman (2021) mengungkapkan Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial mempengaruhi kinerja keuangan yang berorientasi pada proses laporan keuangannya. Jadi dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan

Komisaris Independen dan Dewan Direksi sebagai mekanisme dalam *corporate governance* yang mempengaruhi kinerja keuangan. Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit yang mempengaruhi kinerja keuangan. Karena, variabel Kepemilikan Manajerial berpengaruh dominan pada penelitian Holly dan Lukman (2021), selain itu variabel Kepemilikan Institusional juga berpengaruh dominan pada penelitian Manurung (2022), serta variabel Komite Audit berpengaruh dominan pada penelitian Elisah (2018).

Kepemilikan Manajerial merujuk pada situasi di mana pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan terlibat langsung dalam kepemilikan saham. Manajer yang memiliki proporsi besar saham cenderung mengurangi konflik internal dalam perusahaan, karena mereka memiliki insentif untuk bertindak dengan hati-hati dalam pengambilan keputusan sebagai manajer dan pemilik sebaliknya jika saham yang dimiliki kecil maka partisipasi dalam manajemennya sedikit, yang akan menyebabkan timbulnya masalah keagenan dikarenakan perbedaan kepentingan (Candradewi & Sedana, 2016). Berdasarkan hal tersebut penelitian dari Holly dan Lukman (2021) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara penelitian dari Sari (2023) menyatakan bahwa tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Sembiring (2020), kepemilikan institusional merujuk kepada saham yang dimiliki oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, Bank, perusahaan investasi, dan entitas institusional lainnya. Kepemilikan ini memiliki peran penting dalam mengawasi manajemen dan dapat meningkatkan pengawasan untuk memaksimalkan kekayaan bagi pemegang saham. Sesuai dengan penelitian Elisah

(2018) serta Holly dan Lukman (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan perusahaan. Namun penelitian dari Sari (2023) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan komisaris membentuk komite audit untuk beroperasi secara profesional dan independen, dengan tugas mendukung dan memperkuat fungsi pengawasan dewan komisaris terhadap proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan di perusahaan tersebut. Komite Audit Indonesia (IKAI) menyatakan bahwa komite audit adalah suatu kelompok yang beroperasi secara profesional dan independen dibentuk oleh dewan komisaris. Memiliki peran untuk mendukung dan memperkuat tugas dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit juga penerapan tata kelola perusahaan dalam organisasi. (Rosiana & Mahardhika, 2021). Penelitian Elisah (2018) mengemukakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Namun menurut penelitian Rosiana dan Mahardhika (2021) menyatakan tidak ada pengaruh antara dewan komisaris dengan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena terdapat perbedaan antara hasil – hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pandemi *Covid-19* yang melumpuhkan sektor keuangan sehingga berimbas pada kinerja keuangan perbankan.
2. Terjadi perbedaan pada persentase ROA pada Bank Swasta Nasional di Indonesia.
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk memfokuskan penelitian agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditetapkan. Mengingat terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan, seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan, dan lainnya, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel yang diteliti hanya pada pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit sebagai variabel *X (independen)* terhadap kinerja keuangan sebagai variabel *Y (dependen)* pada perusahaan Bank Swasta Nasional sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, sehingga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mereka. Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya manajemen keuangan tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi kepada perusahaan perbankan ataupun pihak terkait yang berkepentingan sebagai tambahan informasi terhadap keputusan mengenai pengelolaan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit pada perusahaan perbankan.